

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Fenomena munculnya Good Corporate Governance mulai dikenal karena sering diwacanakan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, stakeholder, pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri akan perlunya suatu sistem yang baik dalam meningkatkan transparansi. Untuk menciptakan situasi perekonomian yang baik bagi semua pihak, Good Corporate Governance berkembang diberbagai perusahaan baik yang sifatnya publik maupun swasta. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) telah berdiri di Indonesia untuk menangani mengenai masalah ini. Perusahaan yang baik harus mempunyai sistem pengendalian yang baik, jika itu dilakukan maka perusahaan akan terkendali dan menghasilkan output yang baik, namun kenyataannya penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan khususnya di Indonesia masih relatif rendah, maka tidak heran jika perusahaan di Indonesia umumnya belum dapat maksimal secara kualitas survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di negara Asia menghasilkan bahwa Indonesia menempati posisi paling terakhir dalam menerapkan Good Corporate Governance.

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun di lain pihak, manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima. Jika manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor maka akan menyebabkan jatuhnya harapan

para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Oleh karenanya dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Almilia dan Sifa, 2006)

Perkembangan perusahaan khususnya perusahaan Manufaktur di Indonesia tergolong sangat pesat sampai saat ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Kelangsungan hidup suatu perusahaan Manufaktur sangat dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan tersebut. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini dalam proses manajerial perusahaan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara didunia termasuk di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Peningkatan kinerja adalah gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu didalam suatu perusahaan. Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan komite audit. Komite audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/M- MBU/2002.

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

- b. Organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi untuk Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi untuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN).
- c. BUMN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000.
- d. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.
- e. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan dengan memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham dengan hak suara, atau memiliki 50 % (lima puluh persen) saham dengan hak suara atau kurang dari 50 % (lima puluh persen) saham dengan hak suara dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) hak suara berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham/pemilik modal lain.
 - 2) Memiliki hak untuk menentukan kebijakan di bidang keuangan dan operasional perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian.
 - 3) mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas anggota Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas; dan atau
 - 4) Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan.

Kinerja perusahaan yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki

kinerja buruk, tidak stabil serta profit yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor (Nugroho, 2014)

Good Corporate Governance (GCG) kini ditempatkan di posisi terhormat, hal itu setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *good corporate governance*, di antaranya, sistem regulator yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (Suranta dan Merdistusi, 2004).

Penerapan dan pengelolaan *Corporate Governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat 4 waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003).

Perusahaan harus melaksanakan konsep GCG, sehingga tercipta citra perusahaan yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perusahaan bisa dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat, dan efisien. Penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan dipercaya mampu meningkatkan nilai perusahaan yang nantinya akan meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. di dalam dunia bisnis yang terus berkembang setiap perusahaan berlomba-lomba untuk citra dan persepsi yang baik dari setiap pemegang kepentingan. Perusahaan di dirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Berbagai usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan dilakukan dengan baik

dengan penghargaan yang pernah diraih oleh suatu perusahaan, laporan keuangan perusahaan di nilai wajar tidak ada penyimpangan, serta system tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance merupakan sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem governance antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi, *Corporate Governance* mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan Organisasi. *Good Corporate Governance* memberikan struktur yang menetapkan objektif perusahaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk tujuan perusahaan, serta system monitoring untuk mengukur kinerja. Masa system ini mengatur dengan jelas dan tegas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan suatu korporasi bisnis seperti Dewan Direksi, Dewan Direksi, Manajemen, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. dalam Alijoyo, (2008 : 13-5)

Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih baik lagi dan transparan bagi semua pemegang laporan keuangan.

Sistem manufaktur mempunyai definisi sebagai keseluruhan entitas yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk mengubah resource (material, modal, tenaga, energi dan keterampilan) menjadi produk (barang atau jasa) yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan proses produksi tertentu untuk meningkatkan added value suatu resource (Wignjosoebroto, 2006). Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa fungsi utama sistem manufaktur adalah memproduksi permintaan pelanggan. Ada dua aspek dari permintaan pelanggan yang harus dapat dipenuhi oleh sistem manufaktur yaitu aspek jumlah dan aspek rancangan.

Aspek rancangan meliputi bentuk, warna, kemampuan, ketahanan dan lain-lain, sedangkan aspek jumlah berhubungan dengan kuantitas. Untuk memenuhi kedua aspek permintaan tersebut maka sistem manufaktur harus dirancang seoptimal mungkin. Perancangan tersebut meliputi pemilihan material, pemilihan peralatan, alur produksi, tata-letak lantai produksi, rancangan kualitas, perancangan peralatan material handling hingga biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rancangan tersebut.

Survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di negara Asia menghasilkan bahwa Indonesia menempati posisi paling terakhir dalam menerapkan Good Corporate Governance.

Tabel 1.1 Skor Peringkat Good Corporate Governance di Asia

| No. | Negara | Skor |
|-----|---------------|------------|
| | | Tahun 2016 |
| 1 | Singapura | 1.67 |
| 2 | Jepang | 3.00 |
| 3 | Hongkong | 3.40 |
| 4 | Taiwan | 6.08 |
| 5 | Korea Selatan | 6.17 |
| 6 | Malaysia | 6.95 |
| 7 | Philipina | 7.05 |
| 8 | China | 7.50 |
| 9 | Thailand | 7.67 |
| 10 | Vietnam | 7.92 |
| 11 | Indonesia | 8.00 |

Keterangan : makin tinggi skor, makin buruk Good Corporate Governance

Sumber : Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2016

Survei lain yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA) menghasilkan bahwa 11 negara yang ada di Asia untuk dapat dibandingkan dan dikatakan telah mengikuti standar internasional haruslah mendapatkan nilai 80%. Hal ini terlihat bahwa negara Singapura yang memiliki nilai 67% masih membutuhkan jalan yang panjang untuk mencapai nilai 80%. Apalagi Indonesia yang baru mencapai setengah dari target yaitu 36%. (Asian Corporate Governance Association, 2016).

| Market category scores (CG Watch 2016) | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------|
| (%) | Total | CG rules & practices | Enforcement | Political & regulatory | Accounting & auditing | CG culture |
| Australia | 78 | 80 | 68 | 78 | 90 | 74 |
| 1. Singapore | 67 | 63 | 63 | 67 | 87 | 55 |
| 2. Hong Kong | 65 | 63 | 69 | 69 | 70 | 53 |
| 3. Japan | 63 | 51 | 63 | 69 | 75 | 58 |
| 4. Taiwan | 60 | 54 | 54 | 64 | 77 | 50 |
| 5. Thailand | 58 | 64 | 51 | 45 | 77 | 50 |
| 6. Malaysia | 56 | 54 | 54 | 48 | 82 | 42 |
| 7. India | 55 | 59 | 51 | 56 | 58 | 49 |
| 8. Korea | 52 | 48 | 50 | 53 | 70 | 41 |
| 9. China | 43 | 38 | 40 | 36 | 67 | 34 |
| 10. Philippines | 38 | 35 | 19 | 41 | 65 | 33 |
| 11. Indonesia | 36 | 35 | 21 | 33 | 58 | 32 |

Source: Asian Corporate Governance Association

Hal ini tentu saja membuat semua sektor industri yang ada di masing-masing negara perlu melakukan Good Corporate Governance tak terkecuali perusahaan di sektor perbankan (Martin, 2012).

Pemerintah memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Bukti dari kepedulian pemerintah dapat dilihat dari dibuatnya berbagai regulasi yang mengatur tentang *Good Corporate Governance*. Berawal dari dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Kemudian juga dikeluarkan Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten (Alamsyah, 2010).

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Pearce dan Zahra (1992) dalam Faisal (2005) yang menyatakan bahwa peningkatan ukuran dewan direksi dan dewan komisaris akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya jaringan dengan pihak luar perusahaan dan menjamin adanya

ketersediaan sumber daya. Sedangkan hasil penelitian ini kontradiktif dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2007) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan berdasarkan Hasil penelitian Darwis (2009) dan Abbasi et al. (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Wulandari (2006) dan Hapsoro (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan asumsi, pertimbangan dan alasan pada uraian latar belakang masalah diatas telah mendorong penulis untuk mengetahui dan mempelajari mengenai perusahaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam hal Good Corporate sebagai pokok pembahasan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk peningkatan kinerja perusahaan .

1.2 Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap peningkatan kinerja perusahaan industri Manufaktur yang terdaftar di BEI.” Berdasarkan perumusan masalah pokok penelitian diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Jumlah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan Manufaktur di Indonesia?
2. Apakah Jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan Manufaktur di Indonesia?
3. Apakah Jumlah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan Manufaktur di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh banyaknya Dewan Komisaris Independen terhadap peningkatan kinerja perusahaan Manufaktur di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh banyaknya Dewan Direksi terhadap peningkatan kinerja perusahaan Manufaktur di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh banyaknya Kepemilikan Institusional terhadap peningkatan kinerja perusahaan Manufaktur di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Teoriti

Sebagai bahan referensi perpustakaan dan bacaan yang bermanfaat di sekoah tinggi ilmu ekonomi Indonesia (STEI), dan pihak-pihak yang membutuhkan referensi dengan topic bahasan yang ada di skripsi ini

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca seperti investor, badan otoritas pasar modal, dan para analis keuangan lainnya mengenai relevansi kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh penerapan *Good Corporate Governance*. Dan sebagai bentuk informasi bahwa pelaksanaan program GCG ini ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar tangguh dan sustainable.

3. Bagi Regulator

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perihal praktik *good corporate governance* dan factor-faktor yang mempengaruhinya, selanjutnya diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak regulator dalam meregulasi pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.